

# Siaran Pers

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi NTT



## **Pemerintah Kabupaten TTS, Nagekeo, Manggarai Timur, Rote Ndao, dan Sumba Tengah Berhasil Mempertahankan Opini WTP**

**Kupang, 17 Mei 2022** - Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Adi Sudibyو menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nagekeo, Manggarai Timur, Rote Ndao dan Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021. LHP LKPD tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten TTS (**Marcu Buana Mba'u**), Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao (**Alfret Saudila**), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo (**Yosefus Denga**), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur (**Damu Damianus**) dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah (**Yulius Delu Pila**), Serta Bupati TTS (**Egusem P. Tahun**), Bupati Rote Ndao (**Paulina Haning-Bullu**), Bupati Sumba Tengah (**Paulus S. K. Limu**), Bupati Manggarai Timur (**Agas Andreas**) dan Wakil Bupati Nagekeo (**Marianus Waja**). Penyerahan LHP LKPD merupakan amanat Pasal 17 Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Atas LKPD dari kelima kabupaten tersebut, BPK memberikan Opini *Wajar Tanpa Pengecualian*, yang merupakan opini WTP keempat untuk kabupaten Manggarai Timur, ketiga untuk Kabupaten TTS dan Nagekeo serta kedua untuk Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Tengah. Walaupun demikian masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK antara lain:

1. Pada Kabupaten TTS masih terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja hibah pada empat SKPD dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib.
2. Pada Kabupaten Nagekeo masih terdapat kesalahan penganggaran belanja; dan penatausahaan serta pengamanan aset tetap belum sepenuhnya tertib.
3. Pada Kabupaten Rote Ndao masih terdapat penganggaran belanja modal dan belanja hibah tidak sesuai ketentuan; dan pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran dinas kesehatan tidak tertib.
4. Pada Kabupaten Manggarai Timur masih terdapat penatausahaan dan pengelolaan kas belum tertib; dan penatausahaan aset belum tertib.
5. Pada Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat pengelolaan dan penatausahaan pendapatan asli daerah belum tertib; dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas atas jasa penginapan/hotel.

Dalam sambutannya, Adi Sudibyو, mengharapkan agar pemerintah Kabupaten TTS, Nagekeo, Manggarai Timur, Rote Ndao dan Sumba Tengah dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini di tahun yang akan datang.

Acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua I dan II DPRD Kabupaten Rote Ndao, serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional pada kelima kabupaten, BPK Perwakilan Provinsi NTT, dan BPKP Perwakilan Provinsi NTT.

**HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT**

### **Informasi lebih lanjut:**

Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT  
Jl. W.J. Lalamentik No.91, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840605, Fax. (0380) 840601, Email : perwakilan.ntt@bpk.go.id